

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Kualitas Laporan Keuangan

2.1.1.1. Pengertian

Dengan diselenggarakannya suatu pemerintahan yang akuntabel, hal ini merupakan syarat setiap pemerintah dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bagi negara dan bangsa. Pemerintahan ini terdiri dari pemerintah pusat, daerah dan juga desa yang diharapkan untuk mewujudkan suatu kinerja yang berkualitas dan baik. Maka dari itu untuk mewujudkan suatu kinerja pemerintah tersebut maka pemerintah pusat harus selalu melaksanakan agar laporan keuangan menjadi lebih baik, selain itu pemerintah daerah dan pemerintah desa juga harus mengikuti hal tersebut. Suatu laporan keuangan yang baik dan berkualitas harus dapat berguna untuk transparansi kepada masyarakat.

Suatu Laporan Keuangan adalah salah satu informasi yang berisi suatu data mengenai keuangan baik perusahaan maupun pemerintahan, karena informasi keuangan tersebut bisa dijadikan untuk Gambaran suatu kinerja pada keuangan suatu Perusahaan atau Perusahaan (Hidayat, 2018). Munawir (2014) mengatakan bahwa laporan keuangan yaitu suatu alat penting yang bertujuan untuk mendapatkan informasi berhubungan dengan suatu posisi di keuangan dan hasil yang dicapai oleh suatu pemerintahan dan/atau perusahaan tersebut. Dengan adanya

laporan keuangan tersebut maka diharapkan para pengguna akan terbantu dalam pembuatan keputusan ekonomi yang ada di pemerintahan.

Menurut KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kualitas merupakan tingkat baik dan buruknya sesuatu selain itu juga taraf adat derajat (kecakapan, kepandaian, dan lain sebagainya) serta mutu (Setiawan, 2024). Hertianti mengatakan di dalam bukunya pada tahun 2011 bahwa laporan keuangan secara keseluruhan merupakan laporan yang berisi informasi dan berguna dalam pengambilan keputusan serta bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas suatu laporan atau data yang diolah oleh pengelola keuangan (Hertianti, 2011).

Dengan adanya beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para penulis maka dari sini dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yaitu suatu tingkat baik dan buruknya laporan keuangan yang telah dilakukan oleh pemerintah atas data yang diolah oleh pengelola keuangan. Oleh sebab itu para pengelola keuangan harus memiliki pengetahuan berupa laporan keuangan agar laporan yang dikeluarkan oleh data yang sudah dimasukkan sebelumnya dapat dipertanggungjawabkan dan bernilai baik.

2.1.1.2. Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2021 mengenai Standar Akuntansi Instansi (SAP), karakteristik suatu kualitas laporan keuangan yaitu suatu ukuran normatif yang harus diwujudkan ke dalam informasi sistem akuntansi sehingga tujuannya dapat dipenuhi. Adapun 4 karakteristik sebagai berikut :

1. Relevan

Suatu laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi tersebut termuat di dalam data yang diperoleh sehingga bisa berpengaruh terhadap Keputusan pengelola keuangan dengan cara membantu dalam mengevaluasi suatu kejadian di masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang, selain itu juga bisa memperbaiki atau mengkoreksi dari hasil evaluasi yang sudah didapatkan. Kemudian informasi dari laporan keuangan yang telah relevan tersebut, penggunaannya bisa dihubungkan. Berikut ini adalah informasi yang relevan :

a. Mempunyai manfaat umpan balik (*feedback value*)

Pada informasi ini dapat memungkinkan pemakainya untuk dapat memperbaiki kenyataan yang telah dijalani di masa lampau.

b. Mempunyai manfaat prediktif (*predictive value*)

Pada informasi ini bisa membantu pemakainya untuk memprediksi masa yang akan datang dengan adanya hasil di masa lampau dan kejadian yang telah dirasakan di masa sekarang.

c. Tepat waktu

Suatu informasi laporan keuangan harus dapat disajikan dengan tepat waktu. Hal ini karena laporan keuangan dapat berpengaruh terhadap pengambilan Keputusan dan kebijakan pimpinan.

d. Lengkap

Suatu informasi laporan keuangan harus diberikan secara lengkap, hal itu baik berisi semua informasi laporan keuangan yang bisa berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan dengan memperhatikan suatu

masalah yang telah ada. Pada informasi tersebut ada hal yang melatarbelakangi pada setiap informasi pokok yang ada di dalam laporan keuangan yang tertulis dengan jelas supaya kesalahan dalam menggunakan informasi dapat dihindari.

2. Andal

Informasi di dalam suatu laporan keuangan terhindar dari pengertian yang sesat dan salah secara material, dalam menyajikan tiap fakta dengan jujur dan dapat diverifikasi. Dalam informasi yang relevan tetapi apabila penyajian dalam suatu informasi tersebut tidak bisa diandalkan maka pengguna dari informasi tersebut bisa menyesatkan.

Didalam informasi yang dapat diandalkan mempunyai karakteristik :

a. Penyajian jujur

Suatu informasi yang digambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa yang seharusnya atau dengan wajar bisa diharapkan untuk disajikan.

b. Bisa diverifikasi (*verifiability*)

Suatu informasi dapat disajikan dalam laporan keuangan bisa diuji kebenarannya. Jika di dalam pengujian tersebut dilaksanakan lebih dari satu kali oleh pihak luar maka hasilnya tidak akan berbeda dengan yang sebelumnya.

c. Netralitas

Suatu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dilihat secara umum apabila dibutuhkan serta tidak memihak kepada siapapun pada keadaan tertentu.

3. Bisa dibandingkan

Suatu informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan maka akan berguna apabila bisa dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode yang lalu atau laporan keuangan entitas pada pelaporan lainnya. Perbandingan hal tersebut dapat dilaksanakan secara eksternal maupun internal. Perbandingan internal bisa dilaksanakan apabila entitas telah menerapkan kebijakan sistem akuntansi yang sama setiap tahun. Perbandingan eksternal bisa dilaksanakan apabila entitas yang dibandingkan telah menerapkan kebijakan sistem akuntansi yang lebih baik. Jika entitas pemerintahan telah menetapkan kebijakan akuntansi yang baik daripada kebijakan akuntansi saat ini, maka perubahan itu diungkapkan pada periode saat adanya suatu perubahan.

4. Bisa dipahami

Suatu informasi yang di sajikan ke dalam laporan keuangan bisa dipahami oleh pengguna hal tersebut dinyatakan ke dalam bentuk dan istilah yang telah disesuaikan dengan pemahaman penggunanya. Oleh karena itu, memiliki pengetahuan yang memadai dapat mengansumsikan pengguna atas suatu kegiatan serta lingkungan entitas pelaporan, selain itu adanya keinginan pengguna dalam mempelajari dari informasi yang ada.

Karakteristik informasi keuangan yang dirumuskan oleh IASB meliputi relevansi (*relevance*), penyajian jujur (*faithfull representation*), dapat dibandingkan (*comparability*), ketepatan waktu (*timelines*), dapat diverifikasi (*variability*), dan dapat dipahami (*understandability*). Karakteristik ini merupakan karakteristik kualitatif. Adapun penjelasan dari karakteristik kualitatif diatas adalah sebagai berikut :

a. Relevansi (*relevance*)

Informasi yang relevan adalah informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi untuk pengambilan suatu keputusan. Agar informasi ini memiliki relevansi, maka informasi tersebut harus memiliki nilai prediktif (*predictive value*) dan nilai mengonfirmasi (*confirming value*).

b. Nilai prediksi (*predictive value*)

Informasi yang memiliki nilai prediktif jika bisa menjadi masukan dalam proses memprediksi masa yang akan datang.

c. Nilai konfirmasi (*confirmatory value*)

Informasi akan memiliki nilai konfirmasi apabila mampu mempengaruhi keputusan pengguna, baik menguatkan (mengonfirmasi) ataupun mengoreksi harapan (ekspektasi) sebelumnya.

d. Materialitas khusus-entitas (*entity-specific materiality*)

Informasi keuangan memiliki kesalahan penyajian apabila mempengaruhi keputusan pengguna tentang pelaporan entitas khusus.

e. Dapat dibandingkan (*comparability*)

Dapat dibandingkan ini berarti dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara dua periode suatu laporan

f. Ketepatan waktu (*timeliness*)

Suatu penyajian informasi keuangan dianggap tepat waktu apabila bisa menyediakan informasi pada saat dibutuhkan.

g. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi keuangan harus bisa diperiksa lagi oleh pihak lain dan menghasilkan kesimpulan yang sama.

h. Dapat dipahami (*understandability*)

Informasi keuangan harus dipahami oleh pengguna dengan berbagai latar belakang dan kepentingan.

i. Penyajian jujur (*faithfull representation*)

Penyajian jujur mampu menggambarkan fenomena ekonomi secara lengkap netral dan bebas dari kesalahan.

(Yadiati & Mubarak, 2017)

2.1.1.3. Faktor yang Dapat Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Bersumber pada alur serta unsur yang terlibat dalam menyusun laporan keuangan ada lima faktor pokok yang menentukan kualitas suatu laporan keuangan pemerintahan adalah sebagai berikut :

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi SDM ialah suatu kemampuan SDM dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan dengan bekal pendidikan, pernah mengikuti pelatihan dan mempunyai pengalaman yang lama dalam suatu jabatan tertentu yang linier. Sumber Daya Manusia merupakan suatu hal utama yang harus ada dalam suatu instansi sebagai penggerak organisasi sebagai usaha mencapai visi, misi dan tujuan dari organisasi tersebut.

b. Teknologi Informasi (TI)

Teknologi adalah suatu alat yang dapat digunakan oleh individu dalam menyelesaikan tugas. Teknologi Informasi terkait di dalam sistem komputer (perangkat lunak, perangkat keras, dan data) serta dalam menggunakan jasa yang dapat mendukung dan diberi tugas dalam menyelesaikan suatu panduan

pengguna. Dalam sistem ini juga dapat membantu pengguna apabila suatu informasi diperlukan dengan cepat dan tepat.

c. Peran PPK- Instansi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan/ PMK Nomor 62 tahun 2023 mengenai Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dijelaskan bahwa Pejabat yang berwenang untuk mengelola suatu anggaran adalah Kuasa Pengguna Anggaran/ KPA. KPA ditunjuk oleh Kepala Instansi Pusat yang kemudian dikeluarkan SK untuk di daftarkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dalam hal lain KPA dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengelolaan anggaran pada suatu instansi. Tugas PPK yaitu menyiapkan laporan keuangan dan memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah diberikan oleh Bendahara pengeluaran.

d. Rekonsiliasi

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.OS/2017 mengenai Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara bahwa rekonsiliasi adalah suatu kunci dalam usaha penyusunan laporan keuangan yang bersifat kredibel. Hal tersebut karena perannya cukup penting dalam rangka meminimalisir adanya perbedaan antara pencatatan yang dapat berdampak pada validitas serta akurasi data yang disajikan pada laporan keuangan.

e. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 60 Tahun 2008 bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu proses integral pada suatu tindakan

serta kegiatan yang dikerjakan secara konsisten dan terus menerus oleh seorang pemimpin dan semua pegawai agar dapat memberikan kepercayaan yang memadai atas capaian tujuan instansi melalui suatu kegiatan yang efisien dan efektif, laporan keuangan yang andal, mengamankan aset Barang Milik Negara (BMN) serta ketaatan pada peraturan undang-undang maupun pemerintah. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu pengendalian pengelolaan sistem informasi dan memiliki tujuan untuk memberi kepastian akurasi serta kelengkapan informasi (Basukianto, 2015).

2.1.1.4. Tujuan dan Peranan Laporan Keuangan

1. Tujuan Laporan Keuangan

Pada suatu laporan keuangan pemerintah sebenarnya harus memberikan informasi berupa hal yang bermanfaat untuk pengguna dalam memberikan nilai akuntabilitas serta membuat keputusan, baik keputusan sosial, politik maupun ekonomi dengan cara sebagai berikut :

- a. Menyajikan informasi berupa alokasi, penggunaan serta sumber daya keuangan;
- b. Menyajikan informasi tentang cukup atau tidaknya penerimaan pada periode berjalan untuk mendanai semua pengeluaran;
- c. Menyajikan informasi berupa jumlah Sumber Daya Ekonomi yang dapat digunakan di kegiatan entitas pelaporan dan hasil yang telah dicapai;
- d. Menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan yang memberikan dana semua kegiatan dan dapat mencukupi kebutuhan pada kas;

- e. Menyajikan informasi tentang posisi neraca/keuangan serta kondisi entitas laporan yang berhubungan dengan sumber penerimaannya, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek dan yang berasal dari pinjaman dan penerimaan pajak;
- f. Menyajikan informasi tentang perubahan posisi neraca/keuangan, apakah hal tersebut naik atau turun sebagai akibat kegiatan yang telah dilakukan pada periode pelaporan(Mardiasmo, 2018)

2. Peranan Laporan Keuangan

Suatu laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi tentang posisi keuangan serta semua transaksi yang dilaksanakan oleh entitas pelaporan dalam satu periode. Tiap entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk mealporkan upaya yang telah dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai di dalam pelaksanaan kegiatan yang secara terstruktur dan berurutan dalam periode pelaporan yang digunakan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Suatu laporan keuangan harus dipertanggungjawabkan dalam pengelolaannya dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan harus mencapai target yang telah ditetapkan pada satu periode.

b. Manajemen

Suatu kegiatan yang dilaksanakan pada satu periode pelaporan harus dievaluasi pelaksanaannya agar memudahkan dalam menjalankan fungsi pengelolaan, perencanaan serta pengendalian atas semua kewajiban, ekuitas pemerintah dan aset untuk kepentingan umum.

c. Transparasi

Penyajian informasi laporan keuangan yang terbuka dan jujur terhadap masyarakat umum. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui hal tersebut sehingga hal tersebut sehingga harus terbuka secara menyeluruh untuk segala pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan untuk mengelolanya serta ketaatan kepada peraturan yang telah ditetapkan.

d. *Intergenerational equity* (Keseimbangan antar generasi)

Keseimbangan antar generasi yaitu membantu pengguna untuk mengetahui kecukupan penerimaan keuangan pemerintah pada satu periode pelaporan untuk pengeluaran yang dikeluarkan serta mengetahui apakah generasi masa depan yang diasumsikan akan menanggung beban tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Semua instansi pemerintah harus mengevaluasi suatu kegiatan yang telah dijalankan dan apakah kegiatan tersebut efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, kemudian harus diketahui capaian target yang ditentukan apakah sudah sesuai tujuan.

2.1.2. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

2.1.2.1. Pengertian SAP

Standar adalah pedoman yang seharusnya digunakan. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran pengikhtisaran kejadian dan transaksi keuangan, penyajian laporan dan menginterpretasikan hasil. Pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya SAP atau yang sering disebut Standar Akuntansi Pemerintah yaitu

prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Nugroho, 2010)

Kegiatan akuntansi pemerintah membutuhkan standar akuntansi untuk pedoman dalam penyajian informasi keuangan. Dalam hal ini lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerapkan ini harus ada yaitu untuk membuat kebijakan tentang standar akuntansi pemerintah. Di Indonesia belum ada lembaga yang khusus memiliki kewenangan tersebut tetapi ada ikatan akuntan yang membentuk secara khusus untuk akuntansi sektor publik yang telah merumuskan suatu standar akuntansi publik.

Dengan rangka untuk mempermudah pemahaman pada standar akuntansi pemerintah maka pemerintah membuat Standar Akuntansi Pemerintah yang dibuat oleh komite standar akuntansi pemerintahan.

2.1.2.2. Basis SAP

Pada dasar akrual, basis pelaporan keuangan sektor publik merupakan dasar akrual, yang mana pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas dibayar atau diterima) dan dicatat kedalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode berjalan. Laporan keuangan sektor publik yang disusun atas dasar akrual akan memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya tentang transaksi sebelumnya tetapi kewajiban pembayaran kas yang akan datang serta sumber daya yang menginterpretasikan kas yang akan diterima di masa yang akan datang. Sehingga laporan keuangan sektor publik berisi transaksi masa lalu dan peristiwa yang mempengaruhi pengambilan Keputusan secara ekonomi (Bastian, 2006).

Berdasarkan buku Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2022 yang dibentuk oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Ada 8 prinsip yang digunakan pada akuntansi pemerintah yakni sebagai berikut:

1. *Accounting Basic* (Basis Akuntansi)

Pada basis ini digunakan pada laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu basis kas yang digunakan untuk pendapatan belanja, belanja/beban, dan pembiayaan pada laporan realisasi anggaran serta basis akrual yang digunakan untuk kewajiban, pengakuan ASET dan ekuitas dalam neraca. Pada basis kas digunakan untuk laporan realisasi yang berarti:

- a. Suatu pendapatan diakui saat kas telah diterima di rekening kas atau oleh entitas pelaporan;
- b. Suatu belanja akan diakui saat kas keluar dari rekening kas umum atau entitas pelaporan.

Pada basis akrual yaitu basis akuntansi atas pengaruh transaksi serta kejadian lain saat transaksi dan kejadian itu terjadi, dengan memperhatikan kas atau setara kas yang didapatkan dan/atau dibayar. Suatu basis kas ke akrual yaitu suatu basis akuntansi yang meliputi pendapatan, pembiayaan kas, belanja serta utang, ekuitas dana dan aset berbasis akrual. Neraca basis akrual yang berarti aset, ekuitas dan aset diakui serta dicatat pada transaksi atau saat peristiwa dan kondisi lingkungan berdampak pada keuangan pemerintah, tidak saat kas dibayar atau diterima oleh kas.

Entitas suatu pelaporan di dalam pemerintah tidak menggunakan sistem laba rugi. Karena pendapatan serta belanja yang digunakan bukan tunai misalnya

bantuan dari luar negeri dalam bentuk barang dan jasa yang disajikan dalam laporan realisasi.

2. *Historical Cost* (Prinsip Nilai Historis)

Pada aset dicatat sebagai senilai pengeluaran kas atau senilai yang sesuai dari imbalan (*consideration*) kemudian untuk mendapatkan aset saat perolehan. Kewajiban yang ada pada laporan keuangan dicatat senilai jumlah kas dan/atau setara kas yang akan dibayar untuk memenuhi kewajiban pada masa depan. Nilai historis ini bisa diandalkan dibandingkan dengan penilaian yang lain karena dapat diverifikasi dan lebih obyektif. Lain halnya dengan tidak terdapat nilai historis maka yang digunakan adalah nilai kewajiban terkait atau wajar aset. Prinsip beban/biaya historis yakni dengan mencatat seluruh biaya yang telah dikeluarkan supaya dapat barang yang diperlukan. Hal ini berlaku pada seluruh biaya termasuk barang an jasanya yang telah diperoleh, misalnya Ketika membeli sebuah modem internet pada instansi maka biaya yang akan dicatatkan bukan hanya barangnya saja melainkan juga biaya pemasangan, teknisi dan transportasi juga diperhitungkan.

3. *Realization* (Prinsip Realisasi)

Pada prinsip ini menjelaskan tentang bagaimana suatu instansi mengelola suatu sumber daya dalam satu periode anggaran. Adapun *matching-cost against revenue principle* (prinsip layak temu biaya pendapatan) pada akuntansi pemerintah yang tidak ditekankan dan dipraktekkan dalam akuntansi pemerintah.

4. *Substance Over Form* (Prinsip substansi melebihi bentuk formal)

Pada prinsip ini mengemukakan suatu informasi untuk menyajikan transaksi yang wajar dan kejadian lain yang harusnya disajikan, oleh karena itu transaksi dan kejadian itu harus dicatat serta disajikan dengan realitas ekonomi dan substansi serta bukan hanya aspek formalitasnya. Jika substansi transaksi atau kejadian lain yang berbeda dengan aspek formalitas, maka dari itu harus diungkapkan secara lengkap pada Catatan atas Laporan Keuangan.

5. *Periodicity* (Prinsip Periodisitas)

Suatu pelaporan keuangan dan akuntansi harus dibagi pada periode satu dengan periode lainnya sehingga kinerja entitas pelaporan bisa diukur serta posisi keuangan yang dimiliki dapat ditentukan. Periode yang digunakan adalah tahunan tetapi selain itu periode semesteran, triwulan, dan bulanan juga bisa digunakan.

6. *Consistency* (Prinsip Konsistensi)

Suatu akuntansi menerapkan suatu kejadian yang sama dari periode satu ke periode lainnya oleh entitas pelaporan. Hal tersebut bukan berarti tidak boleh berubah dari akuntansi satu ke akuntansi lainnya. Konsistensi merupakan suatu ketetapan yang berkelanjutan yang diterapkan pada laporan keuangan. Laporan keuangan mempunyai format yang selalu sama dan tidak boleh berubah. Hal tersebut agar laporan dapat dibaca dan tidak membuat orang lain kesulitan dalam menginterpretasikannya.

Rumus yang telah dibuat pada suatu sistem tidak boleh diganti karena dapat menyulitkan pembacanya dalam membandingkan laporan satu dengan lainnya. Metode akuntansi dapat di ubah apabila metode baru dapat memberikan

informasi yang baik daripada metode sebelumnya. Pengaruh yang berubah pada suatu sistem tersebut harus dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip pengungkapan lengkap

Suatu laporan keuangan disajikan dengan lengkap sesuai dengan informasi yang diperlukan pengguna. Informasi yang diperlukan tersebut harus ditempatkan pada lembar muka/ *on the face* laporan keuangan atau di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip penyajian wajar

Neraca, Laporan arus kas, Laporan realisasi anggaran, dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan dengan wajar pada laporan keuangan. Hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan laporan tersebut dibutuhkan saat menghadapi kejadian yang tidak pasti dan keadaan lainnya. Hakikat diungkapkan dengan adanya ketidakpastian dan tingkatannya menggunakan pertimbangan dalam penyusunan suatu laporan keuangan. Pertimbangan yang memiliki unsur keragu-raguan dalam melakukan prakiraan pada kondisi ketidakpastian maka pendapatan dan aset tidak dinyatakan sangat tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan sangat rendah. Namun apabila pertimbangan yang baik tidak diperbolehkan, misalnya dengan sengaja mencatat aset dan pendapatan yang sangat rendah atau sengaja menetapkan beban atau belanja yang sangat tinggi, maka laporan yang dihasilkan menjadi tidak andal dan tidak netral (Efrina, 2024).

2.1.2.3. Indikator SAP

Menurut PP (Peraturan pemerintah) Nomor 71 tahun 2021 menjelaskan Indikator SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) ada 12 Penyataan Standar Akuntansi Pemerintah sebagai berikut :

1. Penyajian Laporan Keuangan

Pada laporan keuangan ini disajikan dengan teratur dalam menyiapkan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan semua transaksi yang dilaksanakan selama periode pelaporan. Tujuan dari laporan keuangan ini adalah untuk mengetahui nilai ekonomi yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasional, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas, menilai kondisi keuangan, serta membantu menetapkan ketaatannya pada peraturan undang-undang. Informasi yang ada di dalam laporan keuangan adalah untuk kebutuhan informasi dalam menilai akuntabilitas serta membuat keputusan. Penyajian ini menerapkan basis akrual dan basis kas yang bertujuan untuk mengakui kejadian/ transaksi yang terjadi.

2. Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Laporan ini berisi ikhtisar sumber, pemakaian sumber daya keuangan, alokasi yang dikelola pemerintah pusat dan/atau daerah. Hal tersebut menuliskan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam periode pelaporan tahun berjalan. Adapun unsurnya secara langsung yaitu belanja transfer, pendapatan LRA, dan pembiayaan. Berikut penjelasan unsur-unsur tersebut :

- a. Pendapatan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) merupakan penerimaan oleh BUN (Bendahara Umum Negara atau entitas pemerintah lainnya yang

dapat meningkatkan saldo anggaran dalam periode tahun berjalan suatu instansi dan tidak harus dibayarkan lagi oleh pemerintah.

- b. Belanja merupakan seluruh pengeluaran oleh BUN (Bendahara Umum Negara) yang dapat menurunkan saldo anggaran dalam periode berjalan yang tidak dibayarkan kembali oleh pemerintah.
 - c. Transfer merupakan uang yang diterima atau dikeluarkan oleh satu entitas pelaporan kepada/dari entitas lainnya, selain itu juga dana bagi hasil dan dana perimbangan.
 - d. *Financing* (Pembiayaan) merupakan pengeluaran atau penerimaan yang tidak mempengaruhi pada kekayaan bersih yang harus dibayarkan atau diterima kembali, baik pada tahun berjalan maupun ataupun tahun setelahnya.
3. Laporan Arus Kas

Laporan ini menyajikan informasi kas dengan aktivitas investasi, operasi, pendanaan, serta transitoris yang berisi penerimaan, saldo awal, saldo akhir dan pengeluaran selama periode tertentu. Adapun unsur ini terdiri dari pengeluaran dan penerimaan kas dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pengeluaran kas merupakan seluruh aliran kas yang keluar dari BUN (Bendahara Umum Negara);
 - b. Penerimaan kas merupakan seluruh aliran kas yang masuk ke BUN (Bendahara Umum Negara).
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Pada pernyataan SAP ini meliputi penjelasan narasi / rincian angka yang terdapat di dalam LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Saldo, Laporan Ekuitas, Laporan Arus kas dan Neraca. CaLK ini dibuat untuk memudahkan pembaca memahaminya, tidak hanya pembaca tertentu tetapi manajemen entitas pelaporan juga dapat memahami isi tersebut. CaLK dibuat dengan sistematis dan menyediakan informasi yang lengkap atas penjelasan semuanya dalam laporan keuangan pada satu periode.

5. Akuntansi Persediaan

Pada persediaan ini merupakan aset lancar yang berbentuk barang/ perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional instansi pemerintah serta barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan ini memiliki potensi bermanfaat pada masa yang akan datang karena mempunyai nilai/ biaya yang andal. Akuntansi persediaan yaitu mencatat/ mengakui persediaan atas hasil inventarisasi fisik setiap periode.

6. Akuntansi Investasi

Pada akuntansi investasi ini ada beberapa kriteria untuk pengeluaran kas tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Mempunyai manfaat sosial dan manfaat ekonomi atau jasa di masa depan atas investasi itu bisa didapatkan pemerintah.
- b. Nilai perolehan/ nilai wajar investasi bisa diukur dengan cara memadai.

Pengeluaran kas untuk investasi jangka pendek adalah pengeluaran kas pemerintah serta tidak harus dilaporkan untuk belanja pada LRA, sedangkan untuk jangka Panjang adalah pengeluaran pembiayaan. Pengakuan atau pengeluaran tersebut merupakan kas yang sudah dikeluarkan untuk investasi setelah manfaat ekonomi di masa depan diperoleh serta nilai perolehan investasi bisa diukur.

7. Akuntansi Aset Tetap

Klasifikasi yang termasuk dalam aset tetap ialah tanah, peralatan, mesin, Gedung dan bangunan, konstruksi dalam pengerjaan, dan jalan. Aset tetap ini sangat bermanfaat pada ekonomi masa depan dan jumlahnya dapat diukur dengan andal. Agar dapat diakui maka aset tetap harus memenuhi kriteria berwujud, biaya perolehan bisa diukur dengan andal, mempunyai manfaat > 12 bulan, tidak untuk dijual pada operasi normal entitas, diperoleh dengan tujuan untuk digunakan. Akuntansi aset tetap merupakan pencatatan aset tetap dengan nilai biaya perolehan serta diklasifikasikan menurut kesamaan pada sifat/fungsinya dalam operasi entitas.

8. Akuntansi konstruksi dalam Pengerjaan

Klasifikasi yang termasuk pada konstruksi dalam pengerjaan adalah tanah, mesin, peralatan, jaringan, irigasi dan aset tetap lainnya, yang proses perolehan/pembangunannya memerlukan waktu tertentu serta belum selesai. KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) adalah suatu barang berwujud yang masuk ke dalam konstruksi dalam pengerjaan jika :

- a. Kemungkinan besar tentang manfaat ekonomis masa depan berhubungan dengan aktiva yang akan diperoleh;
- b. Biaya pemerolehan tersebut bisa diukur dengan andal;
- c. Aktiva masih pada proses pembangunan.

Cara perlakuan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan merupakan informasi konstruksi dalam pengerjaan dalam akhir periode serta memindahkan konstruksi dalam pengerjaan kedalam aset tersebut.

9. Akuntansi Kewajiban

Akuntansi kewajiban yaitu pengeluaran sumber daya ekonomi yang akan dilakukan/ sudah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban hingga sekarang, serta adanya perubahan pada kewajiban mempunyai nilai penyelesaian yang bisa diukur secara andal. Perlakuan akuntansi ini yaitu pencatatan kewajiban sebesar nilai serta mengakui kewajiban saat kewajiban timbul.

10. Koreksi Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, serta Operasi yang tidak dilanjutkan

Koreksi kesalahan merupakan suatu pembetulan pada pos yang disajikan sesuai dengan yang sebenarnya. Hal tersebut tidak boleh berulang saat periode saat itu, baik yang berpengaruh pada posisi kas atau tidak, dilaksanakan dengan pembetulan dalam akun masing-masing di periode saat itu.

11. Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan ini merupakan gabungan seluruh laporan keuangan entitas akuntansi, entitas pelaporan maka disajikan sebagai entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian ini meliputi Laporan perubahan SAL, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Operasional serta disajikan dalam periode berjalan dan berisi jumlah komparatif dengan periode masa lalu.

12. Laporan Operasional

Unsur yang termasuk dalam laporan operasional adalah beban, transfer dan pos-pos luar biasa, pendapatan LO serta menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang dapat meningkatkan ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintahan.

2.1.3. Kompetensi

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi

Menurut Usman Kompetensi adalah hal yang menjelaskan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik secara kualitatif atau kuantitatif (Mohamad Uzer Usman, 2006). Selain itu Charles E. Johnson menerangkan bahwa kompetensi adalah perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kompetensi adalah kemampuan menjalankan tugas atau peran, kemampuan, sikap dan nilai pribadi serta kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karena pengalaman dan pembelajaran lainnya. Selain itu yang termasuk ke dalam kompetensi adalah gabungan antara keterampilan (*skill's*), atribut personal (*personal attribute*) dan pengetahuan (*knowledge*) yang akan terlihat pada perilaku kinerja (*job behavior*) sehingga hal tersebut dapat diamati, diukur dan dievaluasi dengan alat tertentu. Selain itu menurut Spencer and Spencer mengemukakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang menonjol bagi seseorang dan mengindikasikan cara-cara berfikir dan berperilaku dalam segala situasi dan berlangsung secara terus menerus dalam periode yang lama (Hidayati, 2021)

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan No. 13 Tahun 2011 yaitu Kompetensi manajerial merupakan karakteristik seseorang yang merujuk pada kriteria efektif dan efisien atau kinerja unggul suatu jabatan tertentu. Kesimpulan Kompetensi Pegawai adalah suatu kemampuan kinerja seseorang termasuk aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2.1.3.2 Indikator Kompetensi

Adapun Indikator kompetensi yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil di dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008 meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku. Hal tersebut terdapat dalam pengertian kompetensi itu sendiri yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya sehingga PNS yang bersangkutan dapat melaksanakannya dengan profesional, efektif dan efisien.

1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari pengindraan manusia terhadap objek tertentu yaitu melalui indra mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Pada saat pengindraan tersebut maka seseorang akan menghasilkan pengetahuan yang sangat dipengaruhi oleh intensitas terhadap objek tersebut. (Notoadmodjo, 2012). Adapun tingkatan pengetahuan menurut Notoadmodjo yaitu ada 6 tingkatan yaitu sebagai berikut :

a. Tahu (*Know*)

Tahu adalah kata kerja untuk mengetahui orang sudah mengetahui tentang apa yang dipelajari seperti menyebutkan atau menyatakan.

b. Memahami (*Comprehension*)

Memahami adalah suatu kemampuan seseorang untuk menjelaskan dan memahami dengan benar tentang bahan Pelajaran atau obyek yang diketahui serta dapat diinterpretasikan materi tersebut dengan benar.

c. Penerapan (*Application*)

Penerapan ialah kemampuan menafsirkan atau menggunakan suatu bahan yang sudah dipelajari ke dalam situasi konkrit atau baru.

d. Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan atau menguraikan sesuatu ke dalam bagian atau komponen sehingga susunanya dapat dimengerti.

e. Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis adalah kemampuan untuk menghimpun bagian ke dalam suatu keseluruhan jadi kemampuan merumuskan suatu pola atau struktur baru berdasarkan informasi dan fakta.

2. Keterampilan

Menurut Soemarjadi, keterampilan sama dengan kata cekatan. Cekatan ataupun terampil merupakan kepandaian seseorang melakukan sesuatu dengan cepat dan benar. Sedangkan dalam arti luas keterampilan merupakan kegiatan berupa perbuatan, berpikir, berbicara, melihat, mendengar (Jamaluddin & Hajar, 2022).

3. Sikap Perilaku

Menurut Notoatmodjo, Perilaku merupakan suatu aktivitas atau tindakan dari manusia yang mempunyai arti luas diantaranya : berjalan, menangis, berbicara, bekerja, membaca, dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia yang dapat diamati baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak luar. Adapun bentuk perilaku dibedakan menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

- a. Perilaku tertutup merupakan respon manusia terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon ini biasanya masih terbatas pada pengetahuan/ keesadaran, perhatian, persepsi serta sikap seseorang yang terjadi belum bisa diamati dengan jelas oleh orang lain

- b. Perilaku terbuka merupakan suatu respon manusia terhadap stimulus dalam bentuk tindakan yang nyata atau terbuka. Respon ini biasanya sudah jelas terlihat dalam bentuk Tindakan atau praktik.

(Dewi Suma and Ahmad Karim, 2024)

Menurut Spencer & Spencer dalam buku Ruzi Gusman (2003), ada 5 karakteristik kompetensi untuk mengindikasikan berfikir atau cara mendapatkan, bertindak umum pada semua situasi dan tetap bertahan dan beralasan untuk jangka waktu yang panjang yaitu :

- a. Motif (*Motives*); yaitu sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau dikehendaki seseorang yang menyebabkan tindakan. Motif ini mengarahkan, menggerakkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan tertentu atau kegiatan dan menjauh dari yang lainnya.
- b. Sikap (*Traits*); yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai informasi atau situasi.
- c. Konsep diri (*Self concept*); yaitu sikap, nilai dan citra diri seseorang
- d. Pengetahuan (*knowledge*); yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang spesifik tertentu.
- e. Pengetahuan (*Skill*); yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu.(Gusman, 2023)

2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan variabel Penerapan Standar Akuntansi (SAP), Kompetensi Pegawai dan Kualitas Laporan Keuangan yang dapat dilihat pada narasi dibawah ini :

1. Sanusi Arianto (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Palalawan Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empiris dampak penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Palalawan. Variabel dalam penelitian ini adalah Penerapan SAP dan Kompetensi SDM sebagai variabel independent (X) sedangkan Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebagai variabel dependen. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner sedangkan untuk Teknik analisis data menggunakan uji validitas dan uji realibilitas serta untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan SPSS. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 responden. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Semakin tinggi tingkat penerapan SAP dalam penyusunan suatu laporan keuangan maka berdampak positif pada meningkatnya kualitas laporan keuangan.; (2) Kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
2. Meisy Hendri dan Erinos NR (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan penerapan Standar Akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah X atau variabel independent yaitu Kualitas SDM, Penerapan SIMDA dan Penerapan SAP kemudian untuk variabel Y atau variabel dependen adalah Kualitas Laporan Keuangan. Populasi yang digunakan pada penelitian ini 39 jadi sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dengan Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan uji validitas dan uji realibilitas sedangkan pada pengujian hipotesis menggunakan uji analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Hasil penelitian pada penelitian ini adalah Kualitas SDM berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, SIMDA berpengaruh positif terhadap laporan keuangan dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Keuangan Pemerintah.

3. Siti Hasanah, Tapi Rumondang Sari Siregar (2021) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhan batu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan OPD di kabupaten Labuhanbatu. Variabel dalam penelitian ini ada 2 yaitu variabel

dependen dan independent. Variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah SAP dan Sistem akuntansi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan variabel pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

4. Hartono, Ramdany (2020) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh SAP, Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Efektivitas Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 411 satker, pengambilan sampel menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 47 responden. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel bebas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan keuangan baik secara simultan maupun parsial.
5. Ni Komang Ayu Mahartini, Anik Yuesti, dan I Made Sudiartana (2021) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan,

Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Sampel menggunakan metode *purposive sampling* yakni sebanyak 87 orang pegawai. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan SAP dan Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan variabel sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

6. Ade Husna, Maryam dan Samsul Ikhbar (2022) dalam penelitian yang berjudul pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompetensi pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan pada Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini merupakan studi kausal dengan jenis investigasi dengan sampel sebanyak 81 orang. Data tersebut dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program *SPSS V.22.0 for Windows*. Hasil dari penelitian ini kompetensi pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial dan simultan.
7. Enita Binawati dan Cyrenia Tri Nindyaningsih (2022) dalam penelitian yang berjudul pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi

informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh moderasi sistem akuntansi keuangan daerah, mengetahui kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dari populasi sebanyak 168. Teknik Analisa yang digunakan adalah menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini secara parsial menunjukkan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia sistem pengendalian intern dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

8. Abdul Rahman dan Ayudhini Azzahra Permatasari (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh kompetensi SDM dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompetensi SDM dan Sistem Akuntansi Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan populasi sebanyak 369 orang dari 28 SKPD yang tersebar di wilayah kabupaten Buleleng maka didapatkan sampel sebanyak 95 menggunakan rumus slovin. Data yang diperoleh diuji menggunakan analisis Regresi Berganda yang ada pada aplikasi SPSS Versi 17. Hasil dari penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

9. Suwarno, Pius Lustrilanang, dan Sunardi (2023) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Desa dan Komitmen Pimpinan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM, Penerapan sistem akuntansi desa dan komitmen pimpinan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan Teknik sampling adalah *cluster sampling* dan didapat 12 desa dari 13 desa yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Pengujian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi desa dan komitmen pimpinan mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa.
10. Putri Dwi Rahmadani dan Nurfitri Zulaika (2023) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderating. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan Teknik *purposive sampling* sebanyak 123 responden. Teknik Analisa data yang digunakan adalah uji regresi dengan variabel *moderating* yang diolah dengan bantuan program SPSS 22. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah,

kompetensi sumber daya manusia dan *good governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel *moderating*.

11. Aswindawaty A.Mahmud, dan Amir Lukum (2023) dalam penelitian yang berjudul Penerapan SAP dan Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dengan SPI Sebagai Variabel Moderating. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara standar akuntansi pemerintahan, kompetensi pegawai dan kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Gorontalo dengan fokus pada moderasi dari sistem pengendalian internal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini sebanyak 125 pegawai dengan pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik Analisa data menggunakan model regresi linier dan analisis regresi dengan variabel moderasi dengan alat pengolah data menggunakan SPSS Versi 25. Hasil dari penelitian ini adalah Kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah kota Gorontalo dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi pegawai namun sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap hubungan tersebut.
12. Parti dan Hendrik Gamaliel (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji serta mengetahui hasil secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan kota Manado. Penelitian ini menggunakan

metode Asosiatif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.002 pegawai dengan Teknik sampel menggunakan Teknik *simple random sampling* atau menggunakan Teknik sederhana. Teknik Analisa data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini adalah variabel kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

13. Irmawati Hamruna, Zakir Muhammad, dan Rahman Thaher (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan SAP, Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel dalam jurnal ini tidak disebutkan dengan hasil penelitian yang didapatkan bahwa Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Debby Christin Sihasale, Sulistyono dan Supami Wahyu Setiyowati (2018) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan Kompetensi SDM sebagai variabel Moderasi. Tujuan

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) dan Pemanfaatan sistem informasi akuntansi (SIA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi SDM sebagai variabel moderasi. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian konklusif atau penelitian kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang. Sampel Penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dengan MRA (*Moderating Regression Analysis*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman SAP dan Pemanfaatan SIA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh pemahaman SAP dan pemanfaatan SIA terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

15. Restika Wahyuni (2019) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. Penelitian ini adalah penelitian kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling* yaitu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji interaksi atau MRA (*Moderating*

Regression Analysis). Alat bantu yang digunakan adalah SPSS versi 21. Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan variabel kompetensi sumber daya manusia tidak dapat memoderasi pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

16. Elfita Yenni, Mimelientesa dan Fadrul (2020) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi pemerintah dan penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderating. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 174 orang dengan Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling* sehingga didapatkan responden sebanyak 90 orang. Data dianalisis dengan menggunakan SPSS 21. Hasil analisis didapatkan bahwa pemahaman akuntansi dan penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Pekanbaru Dimana kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderating.
17. Kartika Dwi Indriyani (2018) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan Teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dan diperoleh responden sebanyak 88 orang dengan Teknik analisis menggunakan uji regresi moderasi atau MRA menggunakan metode alat analisis yaitu SPSS 15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keuangan daerah sistem akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dalam memoderasi sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

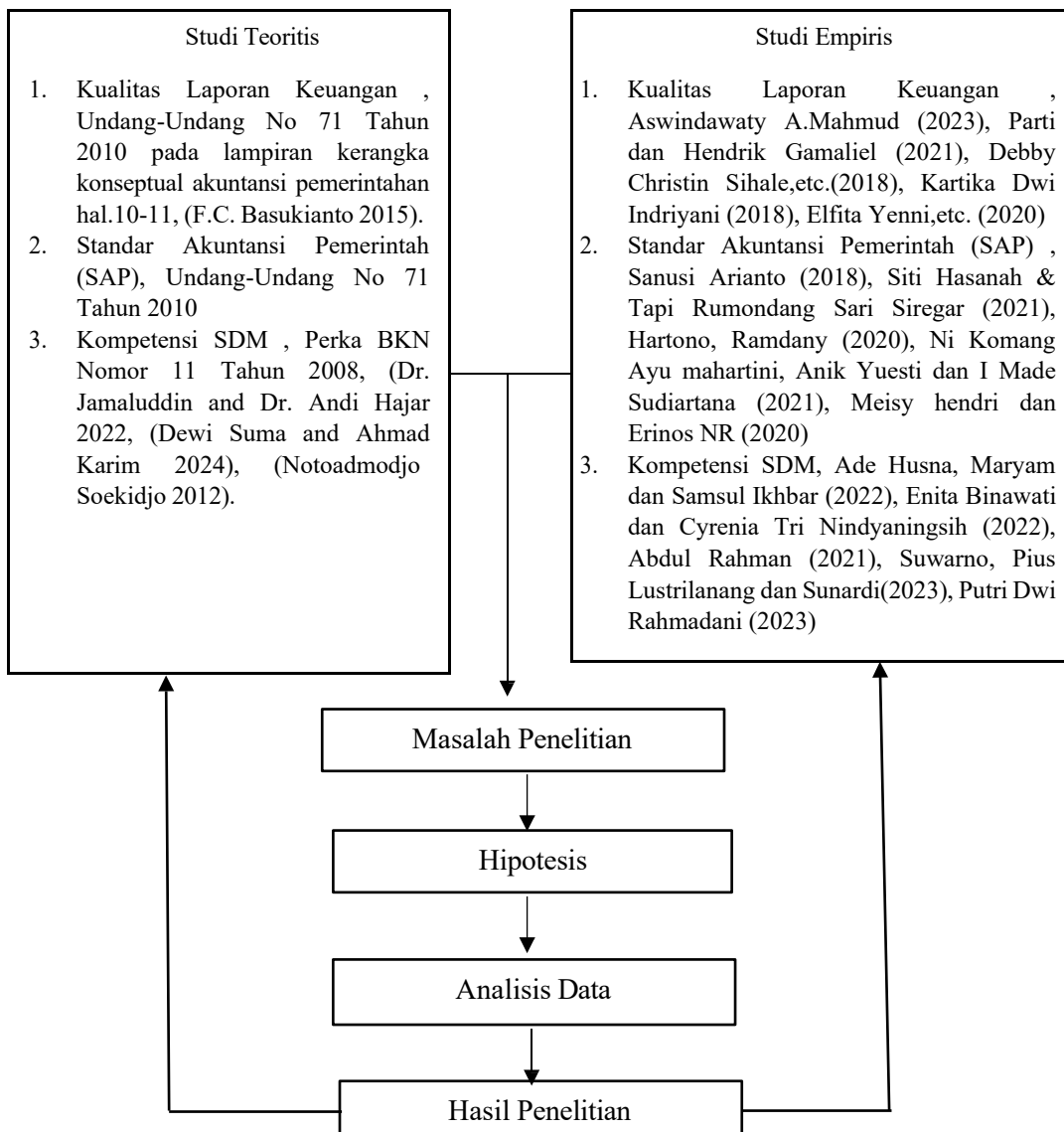
18. A.B.Setiawan, R.P.Tami (2018) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan SAP dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota bogor dengan kompetensi SDM sebagai variabel moderating. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan SAP dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Bogor dengan Kompetensi SDM sebagai variabel moderating. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di 39 satuan kerja dengan Teknik sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga terpilih 195

pegawai yang dijadikan sampel penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah MRA. Hasil penelitian yang didapatkan adalah menunjukkan secara simultan dan parsial penerapan SAP dan SPIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi SDM sebagai variabel moderasi mampu memoderasi pengaruh SAP dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3. Kerangka Berfikir/ Kerangka Konseptual

2.3.1 Kerangka Proses Berfikir

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tinjauan Pustaka yang telah dijabarkan diatas maka dapat dibuatkan kerangka proses berfikir dengan mempertimbangkan studi teoritis dan studi empiris sebagai berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Proses Berfikir

Kerangka proses berpikir pada penelitian ini diawali dengan adanya suatu masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis dan empiris yang relevan dan bisa digunakan untuk menjelaskan atau menganalisis masalah

penelitian. Pola pikir yang sering digunakan untuk membuat kerangka berpikir adalah pola pikir deduktif dan induktif. Pola pikir deduktif dan induktif ini memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelemahannya adalah sulitnya mencari kata sepakat yang bisa dijadikan landasan dalam kerangka berfikir (Louise P., 2022).

Pada gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa kerangka proses berpikir pada penelitian ini disusun berdasarkan kajian teoritis dan empiris yang menghasilkan gap. Kemudian gap tersebut diangkat menjadi masalah penelitian dari variabel-variabel untuk dilakukan studi lebih lanjut. Variabel tersebut adalah :

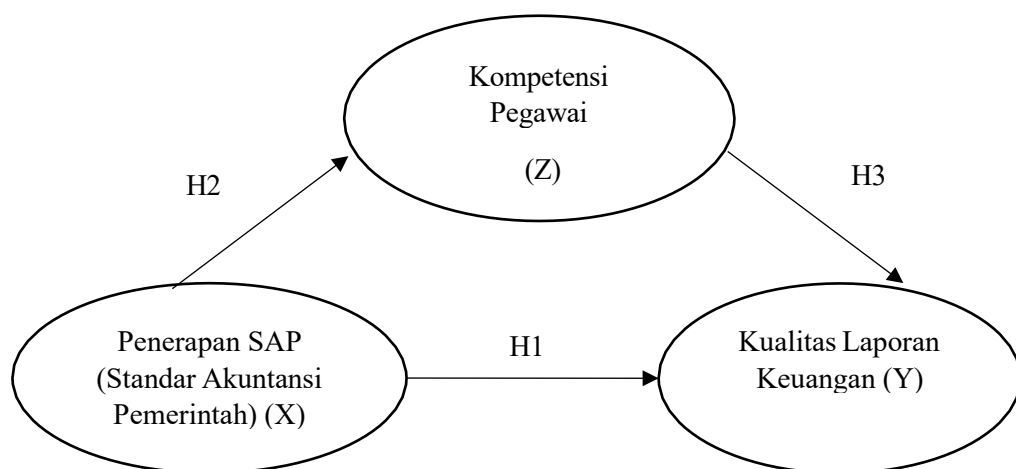
1. Variabel Eksogen adalah Penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) (X) yang meliputi Penyajian Laporan Keuangan (X₁), Penyajian Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas(X₂), Laporan Arus Kas(X₃), Catatan atas Laporan Keuangan (X₄), Akuntansi Persediaan (X₅), Akuntansi Investasi (X₆), Akuntansi Aset Tetap (X₇), Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan (X₈), Akuntansi Kewajiban (X₉), Koreksi kesalahan, Perubahan estmasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi serta operasi yang tidak dilanjutkan (X₁₀), Laporan Keuangan Konsolidasi (X₁₁), dan Laporan Operasional (X₁₂).
2. Variabel Moderating adalah Kompetensi Pegawai (Z) yang meliputi Pengetahuan (Z₁), Keterampilan (Z₂), dan Perilaku (Z₃).
3. Variabel Endogen adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y) meliputi Andal (Y₁), Relevan (Y₂), Dapat dipahami (Y₃) dan Dapat dibandingkan (Y₄).

Pada penjelasan diatas maka diajukan dugaan yang akan diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian hipotesis tersebut perlu dilakukan pengambilan sampel, pengukuran variabel dan pencarian data penelitian. Setelah

data tersebut terkumpul maka akan dilakukan analisis data menggunakan alat SmartPLS (*Smart Partial Least Square*).

2.3.2 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka diuraikan hubungan variabel tersebut. Selanjutnya dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian ke dalam gambar 2.2 sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

Sumber : Data diolah, 2024

2.4. Kerangka Berfikir/ Kerangka Konseptual

Hipotesis adalah suatu asumsi atau anggapan atau dugaan teoritis yang dapat ditolak atau tak ditolak secara empiris. Penentuan apakah suatu hipotesis dapat ditolak atau diterima merupakan tujuan pengujian hipotesis. Jadi hipotesis adalah suatu yang masih kurang dari sebuah kesimpulan pendapat. Tetapi kesimpulan itu belum final, masih harus diuji kebenarannya (Wardani, 2020). Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan, dan kerangka berfikir diatas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Instansi Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

H₂ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh Signifikan terhadap kompetensi pegawai pada Instansi Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

H₃ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah melalui Kompetensi Pegawai berpengaruh Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Instansi Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).